

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KANTOR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN**

RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN

GORONTALO UTARA

Oleh

GRACE SILOM

E11.19.042

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

GORONTALO

2023

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL PADA
KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Oleh

GRACE SILOM
NIM E11.19.042

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 03 April 2023

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN. 0914027902

Pembimbing II



Fitrianti, SE., M.Ak
NIDN.0901129001

HALAM PERSETUJUAN
ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL PADA
KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
GORONTALO UTARA

OLEH
Grace Silom
E119042

Diperiksa oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ihsan Gorontalo

1. **DR.Bala Bakri, SE.,SIP.,Spsi.,MM** :
(Ketua Penguji)
2. **Shela Budiawan M,SE.,M.Ak** :
(Anggota Penguji)
3. **Muh. Sabir SE.,Msi** :
(Anggota Penguji)
4. **Rahma Rizal SE.,Msi** :
(Pembimbing Utama)
5. **Fitrianti, SE.,M.Ak** :
(Pembimbing Kedua)

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi
DR. MUSA FIR, SE., Msi
NIDN 09 281169 01


Ketua Program Studi
Shela Budiawan SE.,MAK
NIDN 09 24038205

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagsan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2023

Yang membuat pernyataan



Grace Silom

KATA PENGANTAR

Segala puja, puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan Karunia Dan Rahmat-Nya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dengan selesainya Skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE., M.Si selaku pembimbing I dan , Ibu Fitrianti, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk

yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan YME..

Gorontalo, 2023

Grace Silom

ABSTRACT

GRACE SILOM. E1119042. THE ANALYSIS OF CAPITAL EXPENDITURE BUDGET PERFORMANCE AT THE SECRETARIAT OFFICE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find and analyze the Capital Expenditure Budget Performance at the Secretariat Office of the Regional People's Representative Council of North Gorontalo District. The type of research used in this study is a qualitative descriptive approach to explain the characteristics of a phenomenon that can be used as a basis for making decisions to solve problems. The results of this study are the performance of the capital expenditure budget seen from the variance analysis of expenditure for 2022, the Secretariat Office of the Regional People's Representative Council of the North Gorontalo has not been able to utilize its budget properly. The performance of the capital expenditure budget seen from the compatibility of expenditure seen from the proportion of the performance of the Secretariat Office of the Regional People's Representative Council of the North Gorontalo is said to be unable to carry out activities for the needs of its development activities because the portion has not been able to reach the portion in general, The performance of the capital expenditure budget is seen from the growth of expenditure where although the growth of expenditure in 2022 cannot be compared to the assessment, the growth of expenditure tends to be positive. The performance of the budget is seen from the efficiency ratio of expenditure in 2022, the realization of the capital expenditure budget does not exceed the capital expenditure budget. It shows that the Secretariat Office of the Regional People's Representative Council of the North Gorontalo has made savings on the budget. It is also supported by the results of interviews that budget realization must be by the budget provided, so the performance of the capital expenditure budget seen from the efficiency ratio of expenditure performance is said to be good.



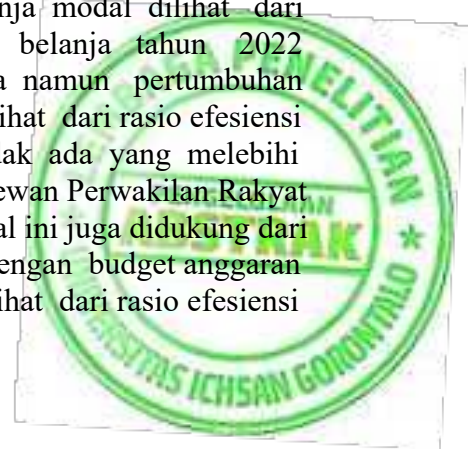
Keywords: budget performance, capital expenditure

ABSTRAK

GRACE SILOM. E1119042. ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis Penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini untuk menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitiannya adalah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja untuk tahun 2022 Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara belum mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik, kemudian kinerja anggaran belanja modal dilihat dari keserasian belanja dilihat dari proporsinya kinerja Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya dikarenakan porsinya belum mampu mencapai porsi pada umumnya, kinerja anggaran belanja modal dilihat dari pertumbuhan belanja dimana walaupun pertumbuhan belanja tahun 2022 pertumbuhannya belum bisa dibandingkan penilaiannya namun pertumbuhan belanja cenderung bernilai positif, dan kinerja anggaran dilihat dari rasio efisiensi belanja tahun 2022 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang melebihi anggaran belanja modal, ini menunjukkan bahwa Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan penghematan atas anggaran dan hal ini juga didukung dari hasil wawancara bahwa realisasi anggaran harus sesuai dengan budget anggaran yang disediakan maka kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja kinerjanya dikatakan sudah baik.

Kata kunci: kinerja anggaran, belanja modal



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“takut akan tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan .”

(amsal: 01:07).

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha”

(Irwanto syamsualam)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimah kasih kepada allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku yang bernama Bapak Rofi Silom dan Ibu Deice Noho

Adik-adiku tercinta , Renaldi Silom

Suport sistemku. Deary Itfel Takasihaeng yang selalu menemani untuk mengurus keperluan skripsi ini

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PEMKIRIAN	
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Anggaran	10
2.1.2 Belanja Modal	17
2.1.3 Analisis Kinerja	24

2.2 Penelitian terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pikir.....	32
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	33
3.2 Metode Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Operasional Variabel.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran lokasi penelitian	37
4.1.2 Hasil Penelitian.....	43
4.1.2 Analisis data	44
4.2 Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu	29
2. Tabel Operasional Variabel	35
3. Tabel Data Belanja Modal Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022	43
4. Tabel Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	44
5. Tabel Pertumbuhan Belanja Modal	45
6. Tabel Analisis Keceratan Belanja.....	46
7. Tabel Rasio Efisiensi Belanja Modal.....	47

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	32
2. Struktur Organisasi	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan berkembang (Wayan et al., 2015). Dimana pembangunan nasional berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketika berbicara mengenai pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Era otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan secara aktif mencari

berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada di daerah yang merupakan tantangan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan pembangunan. Umumnya di negara-negara maju yang merupakan kebijakan *Desentralisasi* atau otonomi daerah cenderung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang lukratif.

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil akrual (realisasi terkini) yang dicapai. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan disuatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perancangan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Belanja modal merupakan jenis pembiayaan pemerintah dengan sifat memberi manfaat jangka panjang. Jenis belanja ini umumnya pada banyak pengertian, dikemukakan sebagai belanja yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap berwujud dengan nilai ekonomis lebih dari dua belas bulan. Kemudian semua pengeluaran atau pengorbanan yang bernilai ekonomi dalam proses realisasi atau pengadaan aset tetap berwujud tersebut oleh Pemerintah juga akan dicatat sebagai realisasi belanja modal dan akan ditambahkan pada nilai dari aset tersebut.

Menurut PP No. 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Badrudin (2012) mengemukakan bahwa belanja publik untuk penyediaan barang modal dilakukan pada tahap awal karena pembangunan ekonomi menimbulkan kebutuhan khusus terhadap barang modal, seperti jalan, pelabuhan, dan instalasi listrik. Infrastruktur dan instalasi akan membantu kegiatan masyarakat dalam aktivitas ekonominya.

Belanja modal adalah poin penting bagi pemerintah dalam wacana menyejahterakan rakyat. Kebutuhan akan transportasi massal yang murah pada masyarakat yang belum mampu membeli kendaraan pribadi dari pihak swasta tentu harus diupayakan oleh pemerintah. Dalam realisasinya, belanja modal memiliki tujuan terkait dengan pelayanan publik karena melihat jenis aset yang biasa

dilaporkan dalam tiap laporan pemerintah memperlihatkan bahwa jenis belanja ini diperuntukkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Jalan, instalasi, bangunan, dan lain sebagainya yang dianggarkan, lebih diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan publik. Manfaat dari aset yang dianggarkan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan belanja modal tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda.

Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah terkontrol dengan baik. Menurut Adi dan Mardiasmo (2002) dalam jurnal Ardi (2017) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan

Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan dapat dilakukan analisis keuangan terlebih

dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui baik buruknya kinerja dari suatu daerah.

Menurut Rudianto (2013:66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Mardiasmo (2009:63) anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi, dan pemborosan.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktifitas belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul ***“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu Bagaimana Penerapan Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang pendapatan daerah

dan belanja modal dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada. dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi.

2. Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

3. Bagi Pembaca dan Akademik.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pendapatan daerah dan belanja modal di pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkret dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan tahapan-tahapan yang kesemuanya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut Indra Bastian (2010:191) berdasarkan national committee on governmental accounting standards board (GASB), definisi anggaran adalah “...rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. Pengertian anggaran menurut Sri Rahayu dan Andry Rachman (2013:4) anggaran adalah “Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian.

Perencanaan adalah pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya”. Dalam sebuah Negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan tahap-tahapan yang kesemuanya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi (*plan for action*) yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut (Mardiasmo:2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undang nomor 133 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses dalam meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui *key performance indicators* (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga)

hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output* serta penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis. Dengan tujuan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005).

Struktur anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan yang dirinci menurut kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan setiap unit kerja dan jenis belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu, sementara belanja adalah semua pengeluaran dalam periode tahun anggaran yang sama. Sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan dalam bentuk pengeluaran pendapatan untuk kegiatan belanja.

Pengembangan indikator keberhasilan menggunakan criteria:

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan.
2. Mudah dipahami, dapat di komunikasikan dengan jelas.
3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan.
4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis.
5. Andal (*reliable*) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi.

Beberapa hambatan dapat diketahui dengan:

1. Realisasi penyerapan belanja daerah termasuk belanja modal dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer dan pelaksanaan program/kegiatan di daerah.
2. Dalam proses perencanaan anggaran di daerah, permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan program-program prioritas antara pihak eksekutif dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD antara pemerintah daerah dengan legislatif.
3. Realisasi belanja modal di daerah pada akhir tahun anggaran seringkali masih di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya.

Hal ini ditengarai karena beberapa hal yaitu:

- a. Terkadang peraturan daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan, setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- b. Adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA dan penetapan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan belanja dan merealisasikannya terbatas sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas penyelesaian kegiatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat penullis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatau organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan di susun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.1.2 Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sektor publik seperti Pemerintah, Anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2009) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

- 1) Alat Perencanaan (*planning tool*)
- 2) Alat Pengendalian (*control tool*)
- 3) Kebijakan Fiscal (*fiscal tool*)
- 4) Alat Politik (*politcal tool*)
- 5) Alat koordinasi dan komunikasi (*coordinatin and communication tool*)
- 6) Alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*)
- 7) Alat motivasi (*motivation tool*)
- 8) Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*). Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*). Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
- 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*). Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 4) Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*). Dalam organisasi sector public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
- 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komukasi (*Coordination and Communication Tool*). Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
- 6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*). Anggaran adalah suatu ukuran yang bias menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

- 7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*). Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
- 8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*). Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengetian Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 49 ayat (5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Menurut Nordiawan (2007) semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. PP 12 Tahun 2019 pasal 55 menunjukkan bahwa pengklasifikasian belanja daerah terdiri atas:

- a. **Belanja Operasi**, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. **Belanja Modal**, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. **Belanja Tidak Terduga**, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. **Belanja Transfer**, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan 10 bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan

anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya.

2.1.1.2 Macam-macam Belanja

Modal Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap lainnya; 6) Belanja Aset lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah.

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja.

Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasa dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

2.1.1.3 Peranan Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset

tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya

Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229).

Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum.

2.1.3 Pengertian Analisis Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menterjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya telah lebih terlebih dahulu ditelaah oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan

akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian.(Mahsun:2012).

Menurut (Mahsun:2006), Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu jika terjadinya overspending dan underspending. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

a. Analisis Varians Belanja.

Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran belanja, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah: Melihat besarnya selisih anggaran belanja dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.

- 1) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- 2) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total belanja.
- 3) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran belanja.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians ini adalah :

- a) Apakah selisih tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan berapa tingkat selisih yang kita ketahui?
- b) Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak ?

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja belanja yang baik apabila mampu merealisasikan belanja yang sesuai jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi belanja melebihi ataupun jauh dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Menurut (Mahmudi, 2010:157) analisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$
--

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Menurut Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan

kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) pengukuran kinerjanya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberi manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) pengukuran kinerjanya sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Menurut Mahmudi (2010) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi belanja.

Menurut Mahmudi (2010 : 166) pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rani Febri ramadha ni, dkk (2016)	Analisis kinerja anggaran dan realisasi pendapatan daerah pemerintah kota samarinda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kinerja keuangan pendapatan kota samarinda dikatakan sangat baik, hal ini di buktikan dengan rata-rata 1,17%, pertumbuhan pendapatan rata rata positif, dan rasio efektifitas rata rata 100%.
2.	Gres Yunita Liando (2016)	Analisis kinerja belanja dalam laporan ralisasi anggaran (LRA) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetn daerah kabupaten kepulauan sangihe daerah.	Hasil penelitian ini adalah belanja pada LRA untuk tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemkab kepulauan sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlihat pada tahun selanjutnya PemKab Kepulauan Sangihe sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta Pimpinan DPPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.

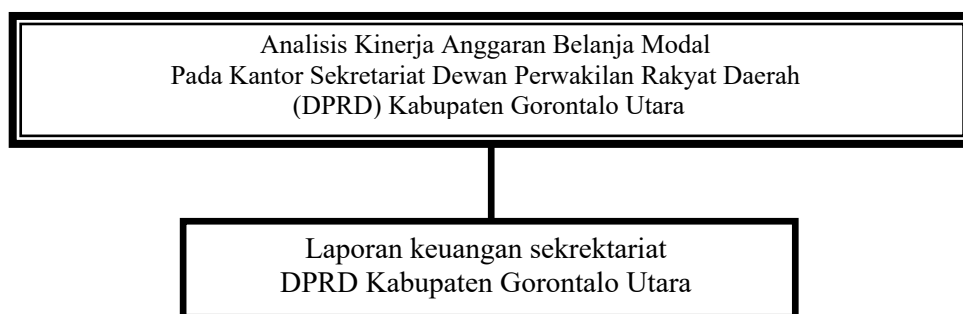
3.	Sakina Tantri (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik; (2) analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa dinas sudah melakukan harmonisasi belanja daerah; (3) Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran tidak melebihi realisasinya. Namun, terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien dan untuk hasil perhitungan dari rasio efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dalam menggunakan anggaran belanja tidak langsung. Secara keseluruhan, kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik.
----	----------------------------	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan 10 bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Penulis menggunakan data pada laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengukur tingkat kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan, keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikir seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2018) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi belanja modal.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Realisasi anggaran belanja modal.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3.3 Desain Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014) Desain adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang bertujuan untuk membangun strategi, yang berguna untuk membangun strategi yang menghasilkan *blurprint* atau model penelitian.

Jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah masalah bisnis. Jenis pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.4 Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana anatar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah Kinerja khususnya Anggaran Belanja Modal yang dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Menurut (Bastian 2006) “Kinerja adalah Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan”.

Belanja modal Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efesiensi belanja.

Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Rumus
Kinerja Anggaran Belanja Modal (Mahmudi, 2010)	a. Analisis Varians Belanja	Analisis Varians Belanja = $\frac{\text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}}{\text{Belanja}}$
	b. Analisis Pertummbuhan Belanja	$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1} \times 100$

	c. Analisis Keserasian Belanja	$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$
	d. Rasio Efisiensi Belanja	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Nasution, dalam Sugiono (2012) menyatakan bahwa, observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara/ Interview

Sugiono (2012) mendefinisikan/wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam tujuan topik tertentu.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala rekaman hasil wawancara serta catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*), artikel, media massa, foto, dan lainnya.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan dideskripsikan. Menurut Bogdan dan Sugiyono (2013), analisis data adalah proses pencairan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendala dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sisitematis, mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2017) Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Menurut Sugiyono (2013) Aktivitas Dalam Analisis Dan Kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori adapun penyajian data tersebut dengan melakukan wawancara

3. Verifikasi / Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007).

Letak Geografis wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terletak antara 0 30' – 1 02' LU dan 121 59 – 123 BT, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolang Mongondow Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Boalemo serta disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah 1.676,15 km atau 12,94% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo.

Luas wilayah pemerintahan dibagi menjadi 11 wilayah kecamatan meliputi 123 desa dengan jumlah penduduk 109.502 jiwa.

Pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara terletak di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Bupati; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah yang dibantu oleh 3 (tiga) Asisten,

dengan membawa 6 (enam) bagian, 2 (dua) Sekretariat, 10 (sepuluh) Badan, 14 (empat belas) Dinas, dan 12 (dua belas) kantor serta 1 (satu) inspektorat.

2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara tidak terlepas dari pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. Perencanaan, Pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
4. Penanganan bidang kesehatan;
5. Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Penanggulangan masalah sosial;
7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
8. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
9. Pengendalian lingkungan hidup;
10. Pelayanan Pertahanan;
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
12. Penyelenggaraan administrasi u

3. Kondisi Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah membentuk dan menyempurnakan dengan peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN

- a. Setwan merupakan unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Setwan dipimpin oleh seorang Sekretaris (SEKWAN) yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah .
- c. Sekwan diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan fraksi .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- A. Fasilitasi rapat anggota DPRD
- B. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD
- C. Pengelolaan Tata Usaha DPRD

4. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekertaris DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas sbb :

- a. Menyelenggaraan administrasi Keuangan
- b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2. BAGIAN TU Dan Humas melaksanakan Sebagian

Sekretariat dibidang umum, kehumasan, perlengkapan dan ketata Usahaan, menyiapkan fasilitas rapat-rapat, konsumsi rapat, perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan hubungan masyarakat

SUB.BAGIAN PERLENGKAPAN,ADMINISTRASI& KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengelolaan dan Pembina administrasi perlengkapan,melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian , kearsipan dan penggandaan dengan fungsi.

SUB.BAGIAN PROTOKOL & DOKUMENTASI

Mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

BAGIAN HUKUM & PERSIDANGAN

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan persidangan dan rapat-rapat,pembuatan risalah fasilitasi kegiatan DPRD dibidang legislasi,budjeting

dan mengawasan,serta menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai kajian perumusan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD,Keputusan DPRD dan Keputusan DPRD.

SUB.BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mempunyai tugas menyiapkan dukungan administrasi yang berkaitan dengan persidangan dan rapat-rapat,menyiapkan peraturan perundang-undangan,bahan naskah surat keputusan,naskah dinas berkaitan dengan kebijakan DPRD serta membuat buku produk hokum DPRD dengan fungsi,

SUB.BAGIAN PERSIDANGAN/RAPAT DAN RISALAH

Mempunyai tugas menyiapkan administrasi persidangan ,tata tempat protokoler internal persidangan ,rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dalam rangka merekam,mencatat,menyusun risalah /notulen siding/rapat serta membukukannya dengan fungsi

Penyiapan pelaksanaan rapat-rapat dan tata tempat rapat DPRD

- a. Mengikuti acara persidangan dan rapat lainnya yang diselenggarakan DPRD
- b. Merekam,mencatat,menyusun risalah/notulen siding /rapat lainnya
- c. Mengumpul dan mengelola data , informasi dan berhubungan dengan risalah/notulen sidang /rapat lainnya untuk dibukukan

BAGIAN KEUANGAN

Melaksanakan sebagian tugas dibidang Perencanaan Penganggaran, Pembayaran, membuat Pembukuan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan dilingkungan Sekretariat DPRD dengan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
- b. Pelaksanaan penelitian/verifikasi administrasi keuangan
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

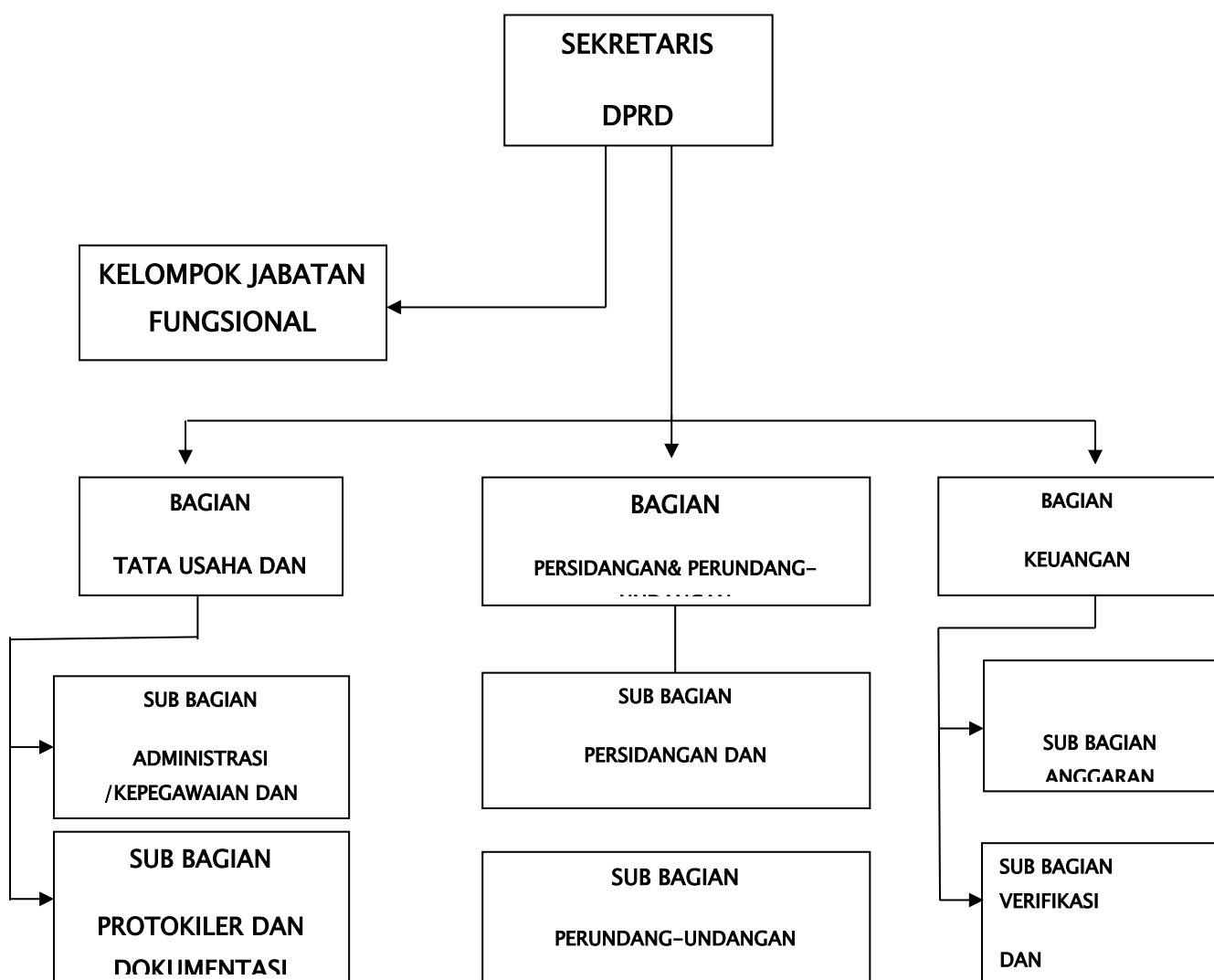
Mempunyai tugas merencanakan, menyusun serta menghitung anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD serta laporan pelaksanaannya dengan fungsi

SUB.BAGIAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN

Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap seluruh dokumen keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta menyelenggarakan administrasi keuangan dengan fungsi ;

Penelitian kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

STRUKTUR ORGANISASI



4.1.2 Hasil Penelitian

Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan data primer yang di dapat dari wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan laporan keuangan, sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanent, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal yang digunakan adalah belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kantor dewan perwakilan rakyat daerah Gorontalo Utara. Berikut ini adalah data Belanja Modal:

Tabel 4.1
Data Belanja Modal
Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD
Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	1.795.848.750,00	1.258.546.339,00
2022	884.823.863,68	879.544.185,00

4.1.3 Analisis Data

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan. Analisis varians belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Menurut (Mahmudi, 2010:157) analisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2021} &= 1.795.848.750,00 - 1.258.546.339,00 \\ &= 537.302.411,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2022} &= 884.823.863,68 - 879.544.185,00 \\ &= 5.279.678,68\end{aligned}$$

Tabel 4.2
Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2021	1.795.848.750,00	1.258.546.339,00	537.302.411,00
2022	884.823.863,68	879.544.185,00	5.279.678,68

Sumber: Data diolah (2023)

Dari data hasil perhitungan diatas tahun anggaran 2021 menunjukkan anggaran sebesar Rp.1.795.848.750,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.1.258.546.339,00 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp. 537.302.411,00. Tahun 2022 menunjukkan anggaran sebesar Rp.884.823.863,68 dan realisasi belanja sebesar Rp.879.544.185,00 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.5.279.678,68.

Untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.537.302.411,00 dan Rp.5.279.678,68.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Latif yang menyatakan:

penyebab anggaran belanja modal tidak terealisasi secara signifikan yaitu karena adanya pengalihan anggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa. (27 Februari 2023)

Kemudian Bapak Latif menambahkan penjelasan bahwa:

dampak ketika anggaran belanja modal tidak terealisasi secara signifikan, tidak terlalu berdampak ke kegiatan pembangunan namun sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengukur perkembangan belanja dari tahun ke tahun bersifat positif atau negatif. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) analisis pertumbuhan belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1} \times 100$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.258.546.339,00 - 0}{0} \times 100 = 0$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{879.544.185,00 - 1.258.546.339,00}{1.258.546.339,00} \times 100 = (0,30)$$

Tabel 4.3
Pertumbuhan Belanja Modal
Tahun 2022

Tahun	Realisasi Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
2021	1.258.546.339,00	0
2022	879.544.185,00	(0,30)

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk tahun 2022 tingkat pertumbuhan bernilai negatif yaitu (0,30) disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan secara signifikan hal ini terjadi karena anggaran belanja modal juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Latif:

biasanya penyebab menurunnya belanja modal karena minimnya realisasi, dan dampak menurunnya anggaran belanja modal yaitu berkurangnya porsi belanja daerah otomatis mengurangi pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggaran belanja modal.

c. Analisis Keserasian Belanja

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah Gorontalo utara. Analisis ini dilakukan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan, dinilai apakah sudah mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunannya atau sebaliknya.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun menurut Mahmudi (2010) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5 – 20%.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) analisis keserasian belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.258.546.339,00}{30.758.413.212,00} \times 100\% \\ &= 4,09\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{879.544.185,00}{32.311.263.023,00} \times 100\%$$

$$= 2,73\%$$

Tabel 4.4
Analisis Keserasian Belanja
Tahun 2022

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal
2021	1.258.546.339,00	30.758.413.212,00	4,09%
2022	879.544.185,00	32.311.263.023,00	2,73%

Sumber: Data Diolah (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas belanja modal yang dikeluarkan oleh kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara untuk belanja modal tahun 2021 rasio belanja modal sebesar 4,09%. Tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan rasio belanja modalnya sebesar 2,73%.

Dari hasil wawancara dengan Bapak latif, beliau menyatakan bahwa :

kriteria penilaian porsi belanja modal terhadap belanja daerah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara berdasarkan atas realisasi.

Selanjutnya beliau menjelaskan:

Adapun porsi belanja modal terhadap belanja daerah tidak sesuai kriteria yang ditentukan disebabkan oleh sesuainya kebutuhan yang diinginkan bukan sesuai kebutuhan yang dianggarkan.

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2010 : 166) rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.258.546.339,00}{1.795.848.750,00} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{879.544.185,00}{884.823.863,68} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Tabel 4.5
Rasio Efisiensi Belanja Modal
Tahun 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi
2021	1.795.848.750,00	1.258.546.339,00	70%
2022	884.823.863,68	879.544.185,00	99%

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan data diatas diketahui tahun 2021 rasio efensi belanjanya sebesar 70%. Tahun 2022 rasio efesiensi belanjanya mengalami peningkatan rasio sebesar 99%.

Hal ini didukung dari hasil wawancara:

yaitu realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya karena realisasi harus sesuai dengan budget anggaran yang disesuaikan.

4.2 Pembahasan

1. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Analisis Varians Belanja

Hasil dari analisis data untuk tahun anggaran 2021 selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar 537.302.411,00. Pada tahun selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.5.279.678,68. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran belanja modal pada tahun 2021 dan 2022 dilihat dari analisis varians belanja kinerja Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mampu memanfaatkan anggaran belanja modal yang direncanakan dengan baik alaupun ada beberapa faktor yang suatu saat bisa membuat anggaran belanja modalnya menjadi tidak baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erisandi Saputra Kinerja belanja ditinjau dari analisis varians belanja sudah dapat dikatakan baik dikarenakan realisasi belanja lebih kecil dibanding anggaran belanja. Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara

langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.

2. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Pertumbuhan Belanja

Hasil dari analisis data pertumbuhan belanja pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Menurut Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Dapat dilihat dari tahun 2022 pertumbuhan belanjanya bernilai negatif yaitu (0,30) hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan secara signifikan hal ini terjadi karena anggaran belanja modal juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan belanja kantor dewan perwakilan rakyat daerah Gorontalo Utara bisa berniali bernilai positif ataupun negatif yang disebabkan menurunnya anggaran belanja modal dari tahun-tahun sebelumnya, dan dilihat dari hasil wawancara penyebab dan dampak dari menurunnya anggaran belanja modal tidak ada menyatakan kinerja yang kurang baik. Jadi kinerja anggaran dilihat dari pertumbuhan belanja kinerjanya sudah baik.

3.. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Keserasian Belanja.

Hasil dari analisis data proporsi belanja modal tahun 2021 rasio belanja modal sebesar 4,09%. Tahun 2022 rasio belanja modal sebesar 2,73%. Menurut Mahmudi (2010) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5 – 20%.

Mahmudi (2016:160) adalah keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Dari hasil pembahasan diatas tahun 2022 biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara dalam pembelanjaan modal mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunan.

4. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja

Dilihat dari hasil analisis data tahun 2021 rasio efesiensi belanjanya sebesar 70%. Sedangkan tahun 2022 rasio efesiensi belanjanya sebesar 99%. Menurut Mahmudi (2010) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efesiensi belanja. Hal ini menunjukkan rasio efesiensi belanja tidak ada yang melebihi dari 100% hal ini juga membuktikan bahwa Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan penghematan atas anggaran.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efesiensi belanja kinerjanya sudah baik.

Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Penelitian Khayatun Nufus, dkk pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah Tangerang Selatan”. Hasil pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pendapatan kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Selatan pada umumnya dikatakan baik dibuktikan dengan rasio pendapatan daerah yang rata-ratanya diatas 100%, pada rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah, rata-rata rasio efektifitasnya 55,002% dan rata-rata efisiensi 5,3304%, lalu kinerja keuangan belanja daerah pemerintah Kota Tangerang Selatan secara masuk dalam kategori sangat baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, analisis pertumbuhan belanja dan rasio efesiensi belanja.

1) Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Analisis Varians Belanja.

Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 kinerjanya menurun, disebabkan anggaran belanja modal yang sudah direncanakan di alihkan ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah sehingga kantor dewan perwakilan rakyat daerah Gorontalo Utara belum mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik.

2) Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Keserasian Belanja

Dilihat dari proporsinya kinerja Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya dikarenakan porsinya belum mampu mencapai porsi pada umumnya.

3) Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Pertumbuhan Belanja

Walaupun pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dan pada tahun 2022 pertumbuhannya bernilai negatif disebabkan karena menurunnya anggaran

belanja modal karena minimnya realisasi namun pertumbuhan belanja cenderung bernilai positif. Jadi kinerja anggaran belanja modal dilihat dari pertumbuhan belanja modal kinerjanya sudah baik

4) Kinerja Anggaran dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja

Tahun 2021 dan 2022 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang melebihi anggaran belanja modal, ini menunjukkan bahwa Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan penghematan atas anggaran dan hal ini juga didukung dari hasil wawancara bahwa realisasi anggaran harus sesuai dengan budget anggaran yang disediakan maka kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja kinerjanya dikatakan sudah baik.

5.2 Saran

- 1) Untuk kinerja anggaran belanja modal Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara agar meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah khususnya belanja modal supaya pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur dapat berjalan baik, efektif dan efisiensi.
- 2) Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara harus mempertahankan kinerja belanja yang sudah baik karena realisasinya tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan, dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya.

- 3) Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara ini harus memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang diterima.
- 4) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara. Dan hendaknya menambah tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan anggaran belanja modal sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
- Abdul, Halim.2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017, Agustus). Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(8), 1-18.
- Anwar Sanusi. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Aprizay, Y.S., Darwanis, Arfan, M. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi.
- Bahrudin, R. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP STIM.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
- Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. BPFE
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.
- J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga.

-----, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.

Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Suhanda.(2007), Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Andalas Lima Sisi, Padang.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

L

A

M

P

I

R

A

N

Lembar Wawancara

Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara

Objek Wawancara	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara
Tempat Wawancara	Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara
Nama Mahasiswa	Grace Silom
Nama Pegawai	Bapak Latif
Waktu Wawancara Dialakukan	27 Maret 2023

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa sajakah bagian LRA di Dewan perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara	Bagian dari LRA adalah: -belanja daerah -belanja modal -belanja operasi
2.	Informasi apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran	Anggaran dan realisasi
3.	Apa penyebab anggaran belanja modal tidak terealisasi secara signifikan	Karena adanya pengalihan anggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa
4.	Bagaimana dampaknya jika anggaran belanja modal tidak terealisasi secara signifikan	Tidak terlalu berdampak sebagian lain tapi sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun
5.	Apa penyebab menurunnya anggaran belanja modal	Karena minimnya realisasi
6.	Apa penyebab meningkatnya anggaran belanja modal	Banyak kebutuhan untuk pengadaan perlengkapan, peralatan, dsb.
7.	Apa dampak menurunnya anggaran belanja modal	Berkurangnya porsi belanja modal otomatis mengupaya pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggran belanja
8.	Apakah ada kriteria penilaian porsi belanja modal terhadap belanja daerah di kantor	Realisasi

	dewan perwakilan rakyat	
9.	Apa penyebab porsi belanja modal tidak sesuai kriteria yang ditentukan	Sesuai kebutuahn yangdiinginkan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan LRA antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 32.642.474.028,42 dan terealisasi sebesar Rp.31.431.718.838,00 atau mencapai 96,29 persen. Anggaran Belanja Modal Rp.884.823.863,68 Realisasi anggaran sebesar Rp.879.544.185,00 atau mencapai 99.40 persen.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA .2022 disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
TA. 2022 Dan TA. 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	189.789,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	189.789,00
4 . 1 . 1	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	189.789,00
5	BELANJA DAERAH	33.527.297.892,10	32.311.263.023,00	(1.216.034.869,00)	96,37	30.758.413.212,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	32.642.474.028,42	31.431.718.838,00	(1.210.755.190)	96,29	29.544.185,00

						28.962.564.462,
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.260.045.856,99	11.512.795.019,00	(747.250.837)	97,22	9.920.102.264,
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.382.428.171,43	19..512.795.019,0 0	(8669.633.152)	95,73	19.042.462.198,
5 . 2	BELANJA MODAL	884.823.863,68	879.544.185,00	(5.279.678)	99,40	1.258.546.339
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.793.010,00	502.413.166,00	(2.379.844)	99,53	1.330.098.750
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.030.853,68	349.543.799,00	(487.054)	99,86	465.750.000
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	27.587.220,00	(2.412.780)	91,96	0

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Grace silom |
| 2. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : kwandang, 19 oktober 2001 |
| 4. Nim | : E1119042 |
| 5. Agama | : kristen |
| 6. Alamat | : Ds. Popalo , Kec. Anggrek , Kab. Gorontalo utara |
| 7. No. Hp | : 0813-5481-9831 |
| 8. Email | : gegesilom@gmail.com |

B. Riwayat Hidup

- | | |
|---------------------|--|
| 1. SD | : SDN 2 anggrek |
| 2. SLTP sederajat | : SMP 2 anggrek |
| 3. SLTA | : SMK negri 1 gorontalo utara |
| 4. Perguruan tinggi | : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas
Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi
2019-2023 |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo LL3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4248/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Grace Silom
NIM : E1119042
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS BELANJA MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 September 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjumuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembaga penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4248/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2022
Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di,- Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Grace Silom
NIM : E1119042
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS BELANJA MODAL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 September 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
SEKRETARIAT DPRD

Alamat Jl. Kusnodanupoyo Kompleks Blok Plan Nomor 02 Desa Molingkapoto
Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 175 / Set-DPRD / Suket / 82 / I / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LATIF M. PASI, SE**
NIP : 19850614 201001 1 005
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Menerangkan bahwa Mahasiswi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, yang tersebut dibawah ini :


Nama : **GRACE SILOM**
NIM : E1119042
Program Studi : S1 - Ekonomi Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Belanja Modal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara.

Telah menyelesaikan pengambilan data dari tanggal 06 September 2022 sd/ 09 Januari 2023 pada sekretariat DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Gorontalo Utara, 09 Januari 2023

PERENCANA AHLI MUDA


LATIF M. PASI, SE
NIP. 19850614 201001 1 005

DOKUMENTASI



